



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Junaidi binti Dalle Dg Masenge, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Caloko, Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone., sebagai **Pemohon I**;

Juliana binti H. Mappangara, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Caloko, Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone., sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Wtp mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah menikah secara agama antara Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus janda cerai dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Andi Sunta Wara dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sultan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi saksi nikah, yaitu: H. Syamsuddin dan Benteng sebagai saksi nikah dengan mahar berupa cincin emas 7 (tujuh) gram.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah lahir dua orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Askar bin Junaidi, lahir pada tanggal 10 September 2020;
 - b. Adiba Hanara binti Junaidi, lahir pada tanggal 04 September 2023.
 4. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Junaidi binti Dalle Dg Masenge) dengan Pemohon II (Juliana binti H. Mappangara) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor 246/AC/2011/PA.Wtp tanggal 21 April 2011 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

B. Saksi

1. Heriyanti binti Lesang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Andi Sunta Wara) atas kuasa dari wali nikah Pemohon II (saudara kandung Pemohon II).
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Syamsuddin dan Benteng.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 7 (tujuh) gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

2. Kartini, S.Pd binti Abu Dg. Mangappe, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Andi Sunta Wara) atas kuasa dari saudara kandung Pemohon II yang bernama Sultan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia selaku wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Syamsuddin dan Benteng.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 7 (tujuh) gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

Halaman 4 dari 9



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ada pihak yang berkeberatan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 September 2017 di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh imam setempat yang bernama Andi Sunta Wara atas kuasa dari saudara kandung Pemohon II yang bernama Sultan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia selaku wali nikah Pemohon II yang dihadiri oleh H. Syamsuddin dan Benteng selaku saksi nikah dengan mahar berupa cincin emas 7 (tujuh) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, para Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan bukti surat: P dan dua orang saksi yang bernama Heriyanti binti Lesang (Saksi 1) dan Kartini, S.Pd binti Abu Dg. Mangappe (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P (akta cerai) serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti sah secara *syar'iy* serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Junaidi binti Dalle Dg Masenge) dengan Pemohon II (Juliana binti H. Mappangara) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami: Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Drs. H. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bintang, S.H.

Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Lukman Patawari, S.H.